



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Dewan Pelototi Dana Hibah

### Naik Rp100 Miliar

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyoroiti besaran belanja dana hibah yang mengalami peningkatan. Pasalnya, dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk RAPBD DKI 2020, Pemprov DKI mengusulkan Rp2,84 triliun.

Alhasil, angka ini meningkat hampir Rp100 miliar dibandingkan tahun lalu yakni Rp2,75 triliun.

"Dana hibah naik terus setiap tahun, padahal hibah enggak wajib," ungkap Dimaz Raditya, anggota Banggar DPRD DKI Jakarta kepada INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, seharusnya tidak harus mengalami kenaikan yang signifikan. "Kita harus tau timbal balik dari daerah pengangga dahulu agar terjalin kerjasama yang menguntungkan buat masyarakat ibu kota," tutur dia.

Hal senada turut disampaikan oleh Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua. Bahkan, ia menyarankan Pemprov DKI untuk mengurangi alokasi dana yang digunakan untuk belanja hibah tersebut.

"Kalau memang tidak dibutuhkan, hibah pangkas saja," tandas dia kepada INDOPOS di lokasi yang sama.

Anggota Banggar dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menambahkan, fraksinya juga menyoroiti draf KUA-PPAS 2020 yang belum diunggah di situs apbd.jakarta.go.id. PSI ingin masyarakat ikut mengawasi proses perencanaan APBD 2020.

"Kami ingin agar tahap-tahap dokumen perencanaan dan penganggaran diunggah di web APBD. Sehingga Tidak hanya anggota DPRD saja, tapi publik juga tahu proses tahapan-tahapan anggaran tersebut," singkat dia.

Seperti diketahui, kenaikan dana belanja hibah itu bukan kali ini saja. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2018 dan 2019 lalu.

#### Alokasi untuk Saptic Tank

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri membeberkan soal kenaikan anggaran belanja hibah setiap tahun. Menurut dia, anggaran belanja hibah diperuntukkan di beberapa sektor.

Seperti pendidikan, terutama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga militer. Adapun anggaran belanja hibah yang dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS).

Pembahasan itu untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 sebesar Rp 2,84 triliun.

"Belanja hibah untuk guru madrasah, termasuk untuk TNI. Jadi besarnya di sana. Lalu hibah Rp 813 miliar dana BOS untuk SD dan SLB

swasta, SMP swasta, SMA swasta, dana BOS SMA swasta, PAUD. Jadi besarnya dana hibah semuanya untuk kembali ke masyarakat," papar Edi dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3, DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Selain belanja hibah yang terus naik, belanja subsidi juga diketahui membengkak jika dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu belanja subsidi Rp4,79 triliun, sementara pada tahun ini diusulkan sebesar Rp7,02 triliun.

Rinciannya, belanja subsidi diperuntukkan bagi subsidi pangan sebesar Rp1,068 triliun, subsidi transportasi Rp5,3 triliun, kereta api sebesar Rp1,6 triliun, revitalisasi septic tank Rp10 miliar.

Sebelumnya, beberapa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyoroiti anggaran belanja hibah sebesar Rp2,84 triliun yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta dalam rancangan KUA-PPAS DKI 2020. (aen)

### KENAIKAN DANA HIBAH

(Dari situs apbd.jakarta.go.id)

APBD Perubahan 2017	Rp1,47 triliun
APBD 2018	Rp1,889 triliun
APBD 2019	Rp2,7 triliun

### HIBAH UNTUK DAERAH PENYANGGA RP618 MILIAR DI 2020

Kota Bekasi	Rp406 miliar	Kabupaten Bogor	Rp11 miliar
Kota Depok	Rp53 miliar	Kota Bogor	Rp44 miliar
Kabupaten Tangerang	Rp20 miliar	Kabupaten Cianjur	Rp15 miliar
Kabupaten Bekasi	Rp34 miliar	Kota Tangerang	Rp35 miliar